

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber daya manusia memiliki andil yang besar dalam menentukan maju atau berkembangnya suatu organisasi (Widjaja, Rohaeni, Alamsyah, & Sukajie, 2018). Sumber daya manusia bukan hanya sebagai alat produksi tetapi juga sebagai penggerak dan penentu berlangsungnya proses produksi dan segala aktivitas organisasi (Subowo & Setiawan, 2015). Sumber daya manusia merupakan asset terpenting didalam suatu organisasi atau perusahaan skala besar maupun kecil (Setiawan & Muhid, 2015). Dengan demikian, kemajuan suatu organisasi ditentukan dari bagaimana kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di dalamnya, tak terkecuali didalam UMKM.

UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peran yang penting dan strategis dalam perekonomian nasional (Sarfiyah, Atmaja, & Verawati, 2019). Seperti yang dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, bahwa UMKM berkontribusi dalam peningkatan PDB (Pendapatan Domestik Bruto) di Indonesia. UMKM menampung hingga 97% dari total tenaga kerja saat ini yang tersebar di Indonesia. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa UMKM menjadi pendorong yang penting dalam pembangunan ekonomi. Dalam hal upaya memberdayakan UMKM, BPS menginformasikan 99,99% unit usaha di Indonesia tergolong dalam kelompok UMKM. Namun, pada kenyataannya UMKM sendiri khususnya UMKM informal masih banyak menemui beberapa hambatan seperti

kurangnya modal, produksi, pemasaran, dan sumber daya yang nantinya berpengaruh terhadap kinerja UMKM tersebut (BPS, 2021).

Kinerja yang baik, maksimal serta optimal merupakan tujuan semua UMKM. Kinerja yang baik di semua sektor baik keuangan, produksi, distribusi maupun pemasaran merupakan syarat mutlak bagi UMKM untuk bisa terus hidup. Dengan kinerja yang baik pula suatu UMKM diharapkan akan semakin kokoh menjadi tulang punggung perekonomian dan akan semakin berperan penting dalam perekonomian Nasional (Kasendah & Wijayangka, 2019). Kinerja UMKM di Indonesia memang cukup membanggakan, dilihat dari jumlah UMKM dan penyerapan UMKM terhadap tenaga kerja saat ini (Hertadiani & Lestari, 2021).

Masyarakat yang ingin menjalankan suatu usaha membutuhkan modal, baik itu dari modal sendiri atau dengan meminjam di bank begitu pula dengan pengusaha UMKM, pemberian kredit untuk UMKM oleh lembaga keuangan sangat membantu pengusaha UMKM untuk menjalankan usahanya (Yanti W. I., 2019). Para pelaku UMKM informal ini memiliki hambatan dalam mengakses lembaga keuangan perbankan. Tingginya angka unbankable people disebabkan karena gap kemiskinan antar provinsi, rendahnya pembiayaan UMKM, suku bunga kredit mikro tinggi, *asymmetric information*, kemampuan manajemen UMKM kurang memadai, monopoli bank pada sektor mikro, dan terbatasnya saluran distribusi jasa keuangan (Septiani & Wuryani, 2020).

Survei yang dilakukan oleh Pusat Peneliti Ekonomi LIPI menghasilkan data, bahwa selama pandemi terdapat 94,69% UMKM mengalami penurunan penjualan. Hal ini

didukung oleh pernyataan Agus Eko Nugroho selaku Kepala Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan profit usaha menurun secara signifikan akibat biaya produksi tetap atau bahkan meningkat sementara penjualan menurun dan kurangnya modal (Lipi.go.id, 2020). Sejalan dengan itu, menurut Vishal Tulsian selaku Presiden Direktur PT Bank Amar Indonesia Tbk., memaparkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan perbankan. Padahal, seperti yang diketahui, kebutuhan UMKM terhadap akses layanan perbankan, khususnya pembiayaan sangat tinggi. Pembiayaan perbankan menurutnya diperlukan untuk mendorong UMKM naik kelas serta meningkatkan daya saing (Vishal Tulsian, 2020).

Adapun data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang juga menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM dalam negeri masih belum mendapatkan akses kepada kredit, data AFPI menunjukkan, dari total sekitar 60 juta UMKM, 46,6 juta atau 77,6 persen diantaranya tidak dapat menjangkau akses kredit perbankan (AFPI, 2021). Upaya pemerintah dalam membangun negara Indonesia maka diperlukan tren pertumbuhan ekonomi yang menguat berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Bappenas, 2019). Untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik diperlukan adanya upaya dari pemerintahan untuk meningkatkan hal tersebut. Terdapat beberapa komponen-komponen pendukung untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Komponen yang dimaksud berupa pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan

dan stabilitas sistem keuangan. Dengan menggunakan instrument untuk kebijakan berupa literasi keuangan dan inklusi keuangan yang dilihat dari berbagai aspek seperti kondisi ekonomi, kondisi demografis, kondisi geografis dan kondisi budaya di Indonesia (Soetiono & Setiawan, 2018).

Akses terhadap layanan produk dan jasa lembaga keuangan merupakan permasalahan yang kompleks sehingga harus menjadi fokus pemerintah untuk terus mengurangi permasalahan ini (Natalia, T, Hendrawaty, & Oktaviani, 2020). Beberapa upaya mulai dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2012 melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, tingkat inklusi keuangan Indonesia berhasil naik hingga mencapai jumlah 67,8% pada tahun 2016 (OJK, 2017).

Peningkatan Inklusi Keuangan di Indonesia yang begitu memuaskan, tidak menjamin bahwa kesejahteraan masyarakatnya telah merata. Hal tersebut ditunjukkan oleh data survei yang dilakukan oleh OJK (2017), sebanyak 18 provinsi dari jumlah 34 provinsi yang ada di Indonesia mempunyai tingkat inklusi keuangan di bawah rata-rata nasional. Hal ini dapat diartikan bahwa lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia belum memiliki tingkat inklusi keuangan yang baik (Sari & Kautsar, 2020).

Menurut Chief Human Resources and Community Investment Officer Prudential Indonesia, Indrijati Rahayoe, saat ini nilai indeks Inklusi Keuangan Indonesia dilaporkan sudah mencapai 76,19%, melampaui target Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yaitu sebesar 75%. Namun, kondisi tersebut masih belum bisa

dikatakan ideal karena masyarakat termasuk UMKM menggunakan produk keuangan tanpa pemahaman yang memadai tentang pengelolaannya (Indrijati Rahayoe, 2021).

Selain Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan juga merupakan faktor yang fundamental untuk pertumbuhan ekonomi dan kestabilan keuangan bagi konsumen, penyedia jasa keuangan dan pemerintah (Yanti W. I., 2019). Literasi keuangan yang baik akan menimbulkan keputusan pembelian yang mengedepankan kualitas, dan meminimalisir keputusan yang salah yang akan diambil terhadap isu ekonomi dan keuangan (Yanti W. I., 2019).

Berdasarkan data OJK pada 2019 Indeks Literasi Keuangan RI baru mencapai 30,03 persen dan Indeks Inklusi Keuangan 76,19 persen. Angka ini berbanding jauh dari Singapura di angka 98 persen, Malaysia 85 persen, dan Thailand 82 persen (OJK, 2021). Hal ini didukung pula oleh pernyataan oleh Ka Jit selaku Direktur Bank OCBC NISP, bahwa masih ada 85,6% generasi muda terlihat “kurang sehat” secara finansial dan perlu segera melakukan check-up, sisanya terlihat “sehat” namun ternyata masih belum ideal terutama dalam sektor UMKM (Ka Jit, 2021).

Literasi Keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperkaya pengetahuan dalam mengelola keuangan. UMKM merupakan industri kreatif yang cenderung memiliki orientasi jangka pendek dalam pengambilan keputusan bisnisnya. Umumnya pelaku UMKM tidak memiliki informasi yang terorganisir tentang kondisi keuangan, pangsa pasar, dinamika kompetisi dan jejak rekam manajemen (Idawati & Pratama, 2020).

Untuk menjalankan suatu usaha, seseorang juga harus memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang keuangan untuk mengelola keuangannya secara efektif, karena itu Literasi Keuangan sangat penting bagi setiap pengusaha. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa kemampuan seseorang dalam mengenali dan mengakses lembaga keuangan akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan perusahaannya (Aribawa, 2016).

Literasi Keuangan mempengaruhi cara berpikir seseorang terhadap kondisi keuangan serta mempengaruhi pengambilan keputusan yang strategis dalam hal keuangan dan pengelolaan yang lebih baik bagi pemilik usaha. Kemampuan mengelola keuangan pemilik usaha memang sangat diperlukan untuk kinerja usaha dan kelangsungan usahanya (Kasendah & Wijayangka, 2019). Dalam pengelolaan keuangan UMKM, pemilik usaha perlu memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi. Karena semakin tinggi tingkat pengetahuan keuangan maka pengelolaan terhadap usaha yang dimiliki juga akan membaik (Rahayu, 2017).

Sedangkan Inklusi Keuangan merupakan kajian yang menyeluruh guna menghilangkan berbagai macam hambatan terkait penggunaan dan pemanfaatan layanan jasa lembaga keuangan oleh masyarakat. Inklusi keuangan merupakan komponen penting untuk mengurangi kesenjangan ekonomi (Yanti W. I., 2019). Masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan tidak akan muncul dengan sendirinya. Hal ini dikarenakan Literasi Keuangan memfasilitasi penggunaan produk secara efektif dan membantu pelaku usaha mengembangkan keterampilan dan produk keuangan terbaik sesuai dengan kebutuhan, kondisi tersebut sebagai syarat untuk meningkatkan Inklusi Keuangan

(Sanistasya, Rahardjo, & Iqbal, 2019). Untuk mengetahui tingkat Literasi Keuangan terhadap pemilik usaha dapat dilihat dari pengetahuan umum tentang perbankan dan pengetahuan bunga tabungan dan pinjaman. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan pemilik usaha maka akan mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan UMKM tersebut (Rahayu, 2017). Oleh karena itu, dibutuhkan upaya-upaya yang strategis guna meningkatkan pertumbuhan Kinerja UMKM. Jika pemahaman dan pengetahuan keuangan berjalan baik, pengelolaan keuangan dan kinerja UMKM dapat berjalan optimal (Kusuma, Narulitasari, & Nurohman, 2021).

Bagi pelaku sektor UMKM sangat penting untuk memahami dan memiliki pengetahuan tentang inklusi keuangan dan literasi keuangan. Hal ini disebabkan inklusi keuangan dan literasi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan yang akan memberikan dampak terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM (Kusuma, Narulitasari, & Nurohman, 2021). Menurut Septiani & Wuryani (2020), Yanti (2019), Fajri, Indriasih & Indriyati (2019), serta Sanistasya, Rahardjo & Iqbal (2019) menunjukkan adanya keterkaitan antara Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Kinerja UMKM.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwa masih minimnya kegiatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dilingkungan UMKM yang mengakibatkan Kinerja UMKM menjadi kurang maksimal, apalagi dalam masa pandemi seperti saat ini. Maka hal tersebut menjadi hal yang menarik untuk diangkat menjadi topik penelitian. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Kinerja UMKM sebagai variabel intervening.

Berdasarkan uraian latar belakang pada masalah tersebut, maka penulis mengambil judul penelitian **“Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Inklusi Keuangan Dan Dampaknya Pada Kinerja UMKM (Survei Pada UMKM di Wilayah Kota Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah yang dapat disimpulkan dan yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- 1) Rendahnya pengetahuan dan minat masyarakat terhadap literasi keuangan.
- 2) Nilai indeks inklusi keuangan Indonesia dilaporkan meningkat, namun kondisi tersebut masih dikatakan kurang ideal karena banyak masyarakat yang menggunakan produk keuangan tanpa memahami tentang bagaimana cara pengelolaannya.
- 3) Banyaknya UMKM di Indonesia yang masih belum memiliki akses langsung terhadap layanan keuangan yang menyebabkan UMKM mengalami penurunan laba usaha serta kesulitan untuk mendapatkan modal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

- 1) Seberapa besar pengaruh Literasi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan,
- 2) Seberapa besar pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM.
- 3) Seberapa besar pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM,

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data terkait Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Inklusi Keuangan Dan Dampaknya Pada Kinerja UMKM, guna dikaji dan dianalisis lebih lanjut sehingga akan diperoleh kebenaran mengenai variabel tersebut.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Literasi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan.
- 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM.
- 3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada UMKM yaitu, masih rendahnya pengetahuan para pelaku UMKM terkait inklusi serta literasi keuangan dan masih terdapat UMKM yang belum memiliki akses perbankan.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis dalam penelitian ini adalah sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama yaitu, mengenai Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Kinerja UMKM.